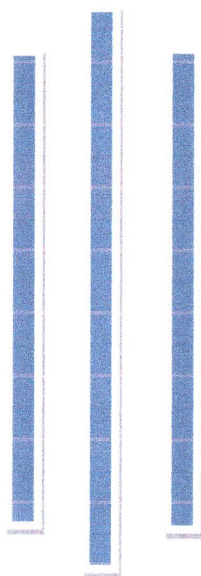


**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN  
(LKjIP)  
TAHUN 2020**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR: 065 / 076.1 / SK / 2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dengan adanya Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- k. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 37 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017

## **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :


- KESATU : a. Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

- c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 25 Januari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



  
**FADHIL, S.Sos.,MM**  
**Pembina Utama Muda /**  
**NIP. 19680919 199011 1 001**



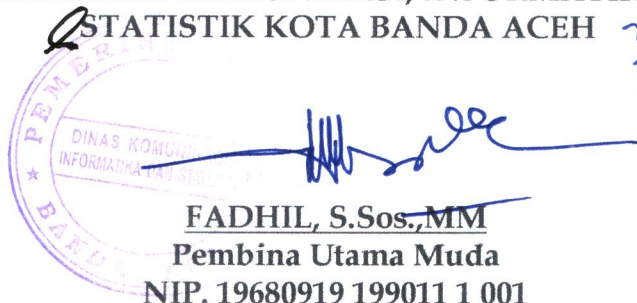
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Diskominfo Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga berpedoman dan mengacu pada Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahun 2020.

Akhirnya Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di dalam pengerjaannya dan di dalam penyajiannya telah diupayakan sebaik mungkin walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Dokumen LKjIP ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH



**FADHIL, S.Sos.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680919 199011 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	2
1.4. Gambaran Umum .....	3
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	
2.1. Rencana Strategis .....	10
2.2. Visi dan Misi .....	11
2.3. Tujuan dan Sasaran .....	12
2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	14
2.5. Rencana Kinerja.....	16
2.6. Penetapan Kinerja .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	20
3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya .....	28
3.2. Realisasi Anggaran .....	30
BAB IV PENUTUP .....	34
LAMPIRAN .....	



## Ikhtisar Eksekutif

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh telah tersusun, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya.

Dokumen LKjIP ini menguraikan pelaksanaan pencapaian program, kegiatan, tupoksi yang ada pada Diskominfo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Diskominfo secara menyeluruh yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, serta beberapa pokok permasalahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya. Simpulan LKjIP Diskominfo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Diskominfo yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebanyak 2 Sasaran dengan 4 Indikator Kinerja Sasaran;
2. Untuk pencapaian sasaran strategis tersebut direncanakan akan dicapai dengan pelaksanaan 8 program dan 32 kegiatan, dimana pada pelaksanaannya terjadi pergeseran skala prioritas sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi 6 Program dan 18 Kegiatan;
3. Dalam pencapaian 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan rata-rata capaian adalah sebanyak 97,41%;
4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut bersumber dari APBD Kota Banda Aceh dengan anggaran sebesar Rp 8.709.917.287,- dengan



realisasi sebesar Rp 8.741.482.075,- atau (100,4%) melalui Belanja Langsung (Rp 5.357.522.848,- dengan realisasi sebesar Rp 5.218.923.419,- atau 97,41%) dan Belanja Tidak langsung (Rp 3.352.394.439,- dengan realisasi sebesar Rp 3.522.558.656,- atau 105,1%). Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dan beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan;

5. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020 ini merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak ditemukan kelemahan, kekurangan sehingga diperlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP dimasa yang akan datang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfo mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi. Salah satu media untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan *good governance* ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Diskominfo adalah media atau dokumen akuntabilitas yang dipakai oleh Diskominfo untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga sebagai dokumen pertanggungjawaban Diskominfo kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh



selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berisi laporan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dari dokumen LKjIP ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tupoksi Diskominfo Kota Banda Aceh serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tupoksi utama LKjIP Diskominfo yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Diskominfo Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Diskominfo Kota Banda Aceh di dalam melaksanakan tupoksinya secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Diskominfo Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang baik dari segi kebijakan, prosedur, pelaporan, pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Diskominfo Kota Banda Aceh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh;
5. Sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja Diskominfo;
6. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Diskominfo bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

### 1.3. Aspek Strategis Organisasi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo serta mencari solusi untuk melakukan pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat tujuan dan sasaran strategis tersebut. Rumusan strategi Diskominfo menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Diskominfo menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan dari Diskominfo. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pada bidang komunikasi, diklat kepemimpinan, dan teknis lainnya;
2. Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral Kota Banda Aceh;



3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis Information Technology (IT) serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo.

#### **1.4. Gambaran Umum**

##### **A. Kedudukan**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfo Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD di dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan komunikasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan para *Stakeholder* lainnya.

##### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota Banda Aceh dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
  - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  - b) Melaksanakan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
  - c) Melakukan pengelolaan e-government.
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
  - a) Melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
  - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

### **C. Susunan Organisasi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 54 tanggal 20 Desember 2016, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
  - a) Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
    3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - b) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, dan
    2. Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
  - c) Bidang E-Government, membawahi
    1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
    2. Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
  - d) Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
    1. Seksi Layanan Hubungan Media, dan

2. Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
- e) Bidang Statistik, membawahi :
  - 1) Seksi Survei Sektoral, dan
  - 2) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terlampir.

#### D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1., 1.2, 1.3, dan 1.4.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	<b>PNS</b>				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	-	-	-	
3	IV/a	5	1	6	
4	III/d	8	2	10	
5	III/c	2	-	2	
6	III/b	1	3	4	
7	III/a	5	2	7	
8	II/d	2	-	2	
9	II/c	1	-	1	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	



13	Jumlah PNS	25	8	33
	Non PNS			
	Peg. Kontrak	17	7	24
	Peg. Honor	-	-	-
	Jumlah Non PNS	17	7	24
	JML PNS + NON PNS	42	15	57

(Diskominfotik, Data Desember 2020)

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Jabatan/Eselonering**

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	10
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

(Diskominfotik, Data Desember 2020)

**Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Tingkat Pendidikan Formal**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	20

3	D IV	0
3	D III	1
4	SLTA/Sederajat	6
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>

(Diskominfotik, Data Desember 2020)

**Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Jenjang Pendidikan Struktural**

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM - II	1
2	S pama / PIM - III	5
3	Adum / PIM - IV	9
Jumlah		16

Sementara itu, rincian barang-barang inventaris atau perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada daftar Tabel 1.5.

**Tabel 1.5 Rekapitulasi Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh**

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 (Mini Bus)	3
2	Earphone Wireless	5
3	Harddisk External 3.5 Inch - 2TB	8
4	Hardisk Repositori	1
5	Komputer	14
6	Accesspoint	1
7	Almari	6

8	Brangkas	1
9	Kursi Kantor	28
10	Laptop	13
11	LCD Console	1
12	Meja Kantor	29
13	Memori Stick	2
14	Mesin Absensi	1
15	Baterai Tester	1
16	CO <sub>2</sub>	1
17	Tangga	1
18	Power Supply	12
19	Printer	7
20	Printer Gaji	1
21	Proyektor - HD	1
22	Router board 450	5
23	Sofa	1
24	Tripod Camera	2

**1.5. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya berfungsi untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Diskominfotik di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat diilustrasikan dalam sebagai berikut.

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum



1.5 Sistematika Penulisan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis

2.2. Visi dan Misi

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

2.5. Rencana Kinerja

2.6. Penetapan Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun pada Diskominfo dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo dimana dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, sehingga Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Rencana strategis Diskominfo disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan Diskominfo selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra Diskominfo terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian Renstra Diskominfo juga tidak terlepas dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Diskominfo menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfo adalah :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pada bidang komunikasi, diklat kepemimpinan, dan teknis lainnya;
2. Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral Kota Banda Aceh;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis Information Technology (IT) serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terfokus di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta

pencapaian visi dan misi Diskominfo. Kebijakan yang dilakukan Diskominfo setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mengikut sertakan aparatur dalam segala bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik;
2. Melakukan koordinasi, penerapan Informasi Teknologi (IT) dan kerja sama dengan instansi terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan, dan
3. Menjalani kerjasama dan koordinasi intens dengan semua *stakeholder* dibidang penyediaan data dan informasi statistik sektoral Kota Banda Aceh.

## **2.2. Visi dan Misi**

### **A. VISI**

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah merupakan tahap penting di dalam penyusunan dokumen Renstra Diskominfo. Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin diwujudkan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi Diskominfo merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan pada Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas, Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan TIK Menuju Masyarakat Banda Aceh Gemilang yang Islami”.

### **B. Misi**

Misi Diskominfo adalah prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
3. Menyediakan data statistik yang berkualitas dan terintegrasi;
4. Membangun sistem aplikasi SKPD yang berkualitas dan terintegrasi;
5. Menjadikan data sebagai sumber basis berita dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional berbasis TIK.



## **2.3. Tujuan dan Sasaran**

### **A. Tujuan**

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

### **B. Sasaran**

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Diskominfo Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik

Tujuan dan Sasaran dari Diskominfo bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfofik Tahun 2017 - 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
			2 website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
		2 Meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	3 aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	90%	92%	93%	94%	95%	BIDANG PIP / BIDANG SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
			4 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

(Renstra dan IKU Diskominfofik)



## 2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya melalui satu atau beberapa program yang didukung oleh kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan serta bisa dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa

Adapun program Diskominfo yang telah dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik;
  - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  - 1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
  - 1.8. Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang;
  - 1.9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;



- 2.4. Pengadaan Mebeleur;
- 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 2.6. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- 2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 3.1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
  - 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- 4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
  - 4.1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah;
  - 4.2. Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah.
- 5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
  - 5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
  - 5.2. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi;
  - 5.3. Pengadaan alat studio dan komunikasi;
  - 5.4. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi;
  - 5.5. Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi.
- 6. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
  - 6.1. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
- 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  - 7.1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.
- 8. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
  - 8.1. Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah
  - 8.2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - 8.3. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

## 2.5. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2020 yang memuat sasaran strategis, indikator tujuan dan sasaran kinerja serta target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2020 bisa dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo (IKU)**

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA
1	2		3		4	5
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	15%
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2	Persentase website OPD yang aktif	70%
				3	Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	93%
				4	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	45%

## 2.6. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah beban kerja kepada atasan langsungnya atau bisa juga merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.



Adapun Tapkin Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sementara itu, Program dan Kegiatan yang secara langsung mengacu kepada pemenuhan target penetapan kinerja bisa dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.3 Penetapan Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	15%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	70%
		Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	93%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	45%

**Tabel 2.3 Program dan Kegiatan yang Mengacu Kepada Pemenuhan Target Penetapan Kinerja**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	427.087.500
		Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah	69.243.417
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	38.335.898
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	18.300.000
		Pengadaan alat studio dan komunikasi	5.512.500
		Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	1.100.052.375
		Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	36.828.285
3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	76.072.500



4	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	105.687.467
5	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	710.947.125
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	37.889.066
		Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	245.037.863

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang mengacu kepada Dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian kinerja yang telah disepakati dimana hal ini akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang memiliki target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi target kinerja dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2020. Capaian kinerja Diskominfo pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	Persentase	15%	15%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Website OPD yang Aktif	Persentase	70%	70%	100%
		Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	Persentase	93%	93%	100%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Persentase	45%	45%	100%

Pada Tabel 3.1 terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfo, dimana pada sasaran strategis 1 terdapat 1 indikator kinerja yang pada tahun 2020 mencapai target 100%. Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 3 indikator kinerja dimana semua indikator tersebut mencapai target (100%).



3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

A. Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi

Tolok ukur tercapainya Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.2.

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	2020			Target Capaian 2021	Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap Target 2022 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	5%	10%	15%	15%	100%	20%	25%	60%

Persentase capaian realisasi target kinerja dihitung dengan formula  $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$  dan melihat kepada pencapaian atau realisasi kinerja pada tahun 2020 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 15%.

Pada Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebesar 5%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2019 sendiri, Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah 10% dimana sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2020 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 15%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai angka pemenuhan sebanyak 60%.

Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu disebabkan oleh tercapainya penyediaan data set yang diharapkan dan juga terupdatenya data statistik



sektoral, dimana penanggung jawab dari target ini ada pada bidang Statistik pada Diskominfo. Oleh sebab itu, bidang terkait harus mampu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan selalu *update* atau tepat waktu serta mampu terus meningkatkan sinergitas dengan para *stakeholder* data statistik sektoral, baik di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, maupun dengan pihak lainnya.

Sementara itu untuk mencapai target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu pada Tahun 2020 didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah yang memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah dan Kegiatan Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah dimana tingkat pencapaian dari keluaran dan anggarannya mencapai angka 100%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebanyak 20%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, target yang diharapkan pada tahun 2021 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo. Pada tahun 2021 sendiri, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja adalah masih belum ditetapkannya pengelola data statistik sektoral di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh serta belum bakunya bentuk data statistik yang digunakan di lingkungan Kota Banda Aceh sehingga masih terjadinya benturan diantara Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang menjadi sumber data dengan Diskominfo sebagai pengelola data. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya dilakukan pembakuan bentuk data statistik yang digunakan serta ditetapkannya Diskominfo sebagai pengelola data.

Tabel 3.3 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 1

NO	Sasaran Strategis	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi			Satuan		Persentase	
	Indikator Kinerja	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu			Target		15%	
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember			
					Rp		%	
					T	R	T	R
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	32.283.930	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	32.283.930	32.283.930	32.283.000	100	100
			Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah	-	-	-	-	-

(RKPK Diskominfo Tahun 2020 )

**B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik**

Tolok ukur tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Aktif, Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi, dan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.4.



Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	2020			Target Capaian 2021	Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap Target 2022 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Website OPD yang Aktif	65%	65%	70%	70%	100%	75%	80%	88%
2	Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	90%	92%	93%	93%	100%	94%	95%	98%
3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	0%	0%	45%	45%	100%	50%	55%	82%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik didukung oleh 3 (tiga) indikator dimana semuanya mencapai target. Rincian pencapaian target sasaran melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 70%, dimana angka realisasi pencapaian dari website OPD yang aktif adalah sebesar 70% dari semua website OPD yang ada di Kota Banda Aceh. Angka dan data ini diperoleh dengan 
$$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$$
 perhitungan formula. Pada Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebesar 65%. Angka ini sama dengan pencapaian kinerja pada Tahun 2019 dimana Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebanyak 65% dan sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai angka 88%. Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target kinerja pada sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebanyak 75%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun



2018, tahun 2019 dan tahun 2020, target yang diharapkan pada tahun 2021 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo. Pada tahun 2021 sendiri, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) sebagai penanggungjawabnya. Sementara itu tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola sudah mencapai target yang diharapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang PIP sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu diharapkan Bidang PIP mampu untuk terus memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan SKPD/OPD sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya semakin naik. Selain itu koordinasi dan inisiasi serta keaktifan dari setiap SKPD/OPD di Kota Banda Aceh juga sangat diharapkan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja.

2. Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 93%, dimana angka realisasi pencapaian dari aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi oleh Diskominfo adalah sebesar 93%. Angka dan data ini diperoleh dengan

perhitungan formula 
$$\frac{\text{Jumlah}^{\text{pengaduan}}_{\text{informasi}} \text{ masyarakat ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah}^{\text{pengaduan}}_{\text{informasi}} \text{ masyarakat yang masuk}} \times 100\%.$$
 Pada

Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi adalah sebesar 90%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2019 sendiri Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi adalah sebanyak 92% dimana angka ini sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai angka 98%. Berdasarkan Tabel 3.4

dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target kinerja pada sasaran Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi adalah sebanyak 94%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, target yang diharapkan pada tahun 2021 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo. Pada tahun 2021 sendiri, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan Bidang Smart City sebagai penanggungjawabnya. Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase aspirasi/informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi dikarenakan oleh perhitungan antara jumlah pengaduan atau informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Diskominfo dibandingkan dengan jumlah pengaduan atau informasi masyarakat yang masuk melalui bidang PIP dan juga bidang Smart City sebagai penanggung jawab program dan kegiatan sudah sesuai dan tidak ada permohonan yang tidak dapat direspon. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang PIP dan Bidang Smart City. Oleh karena itu diharapkan Bidang PIP dan Bidang Smart City sebagai penanggung jawab untuk mampu terus merespon setiap aspirasi/informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi berdasarkan kriteria Informasi Publik yang telah ditetapkan. Selain itu pengelolaan aspirasi/informasi masyarakat diharapkan semakin baik dan teratur sehingga memudahkan penanggung jawab di dalam merespon setiap permintaan Informasi dari masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyediaan informasi dari pemerintah kota melalui kanal resmi maupun dari *stakeholder* rekanan pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 45% dimana angka realisasi pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 45%. Angka ini sudah sesuai dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yang telah dilakukan. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula 
$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%.$$
 Pada Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Cakupan



Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 0%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2019 sendiri Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 0% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo, dimana hal ini disebabkan oleh adanya Revisi pada Renstra dan IKU Diskominfo sehingga Target Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government ini baru dilakukan pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai angka 82%. Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target kinerja pada sasaran Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 50%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, target yang diharapkan pada tahun 2021 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo. Sementara itu tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dikarenakan oleh perhitungan dari mampu dilayaninya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki aplikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD yang ada di Kota Banda Aceh melalui Bidang E-Government sebagai penanggung jawab. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government. Dikarenakan pada Cakupan Layanan E-Government yang dikelola oleh Diskominfo melalui bidang E-Government, jumlah aplikasi yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh melalui setiap SKPD wajib dikelola oleh Diskominfo Kota Banda Aceh melalui Bidang E-Government. Oleh karena itu diharapkan Bidang E-Government sebagai penanggung jawab diharapkan mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap SKPD yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfo untuk pencapaian tahun kedepannya, seperti melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh seperti *masterplan/blue print* SPBE Pemko, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh serta melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen Proses



Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting dikarenakan dalam rangka penilaian oleh Pemerintah Pusat terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE ini dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfo melalui Bidang E-Government mampu bekerjasama dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga memudahkan tim E-Government didalam melakukan proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai.

Sementara itu di dalam mencapai target kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik pada Tahun 2020 didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi, dan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa yang memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat. Tingkat pencapaian masing-masing program dan kegiatan ini sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.5.



Tabel 3.5 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 2

N O	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik			Satuan		Persentase	
	Indikator Kinerja	Persentase Website OPD yang Aktif			Target		70%	
		Persentase Aspirasi / Informasi Masyarakat yang Dapat Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi					93%	
		Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan					45%	
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember			
Rp					%			
T					R	T	R	
1	Program Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.552.021.472	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	240.505.100	240.505.100	239.552.750	100	100
			Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-
			Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	1.997.938.942	1.997.938.942	1.955.186.300	100	98
			Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	313.577.430	313.577.430	305.177.430	100	97
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-
3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-
4	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.555.129.100	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	805.473.500	805.473.500	787.082.500	100	98
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	702.444.220	702.444.220	697.604.220	100	99



			Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	47.211.380	47.211.380	44.631.380	100	95
--	--	--	---	------------	------------	------------	-----	----

### 3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain berupaya mencapai target kinerja dari dua sasaran Strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Diskominfo Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan misi kelima Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yaitu untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dimana Diskominfo harus mampu untuk terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut Diskominfo harus terus berkembang, harus melengkapi dan mengupgrade diri dengan sarana prasarana TIK yang memadai, memiliki manajemen data dan informasi yang berkualitas kinerja tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2020, Diskominfo juga memiliki dua peran yang harus dicapai yaitu melanjutkan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh yang telah terpilih sebagai salah satu dari 100 Kota dengan konsep pelayanan Smart City dan juga berperan sentral untuk meningkatkan Indeks Pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh yang berada di dalam Cakupan Layanan E-Government Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Diskominfo telah berhasil menyelesaikan Dokumen atau Buku Smart City yang akan menjadi panduan di dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota dengan konsep pelayanan Smart City dan terus melakukan upaya-upaya kesinambungan seperti *Forum Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait dengan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota Smart City. Sementara itu pencapaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh akhirnya mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan nilai 2,87 (CC) dari target 2,8 (CC).

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun 2020, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo seperti :



1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfo;
3. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
4. Terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfo di dalam rangka pencapaian target kinerja dimana selain adanya prioritasasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh, terjadi juga *refocusing* plafon anggaran yang diberikan akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang sebenarnya masuk di dalam Rencana Strategis Diskominfo dan juga Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020.

Beberapa strategi atau upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Diskominfo pada tahun kedepannya adalah :

1. Memaksimalkan plafon anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo yang bisa berasal dari melalui sumber dana APBD, OTSUS, Hibah dan Migas;
2. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pembinaan dan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT dimana tentunya tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
3. Menyusun, menata dan membakukan SOP, regulasi atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfo

### 3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Diskominfo pada Tahun 2020 adalah sebesar 97,41% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi Keuangan khusus Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020 dapat dilihat dengan perincian pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Belanja Langsung Diskominfo Tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPPA) TA.2020	Realisasi Anggaran TA.2020	%
<b>I</b>	<b>Pelayanan Adm Perkantoran</b>	<b>1.100.123.296</b>	<b>1.067.329.774</b>	<b>97,02</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	93.426.000	75.732.344	81,1%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.550.000	3.678.000	66,3%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.773.125	17.157.100	96,5%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.050	8.000.050	100,0%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.406.000	96,2%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	57.190.000	53.680.000	93,9%
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30.024.121	28.366.280	94,5%
8	Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang	-	-	-
9	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	885.660.000	878.310.000	99,2%
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>84.965.050</b>	<b>58.176.065</b>	<b>68,47</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-
4	Pengadaan Mebeleur	-	-	-
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	-	-
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ operasional	63.085.920	42.628.065	67,6%
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-



	8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	21.879.130	15.548.000	71,1%
	9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeluer	-	-	-
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>33.000.000</b>	<b>31.900.000</b>	<b>-</b>
	1	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	-	-	-
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	33.000.000	31.900.000	96,7%
<b>IV</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>		<b>32.283.930</b>	<b>32.283.000</b>	<b>100,00</b>
	1	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	32.283.930	32.283.000	100,0%
	2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	-	-	-
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa</b>		<b>2.552.021.472</b>	<b>2.499.916.480</b>	<b>97,96</b>
	1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	-	-	-
	2	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	240.505.100	239.552.750	99,6%
	3	Pengadaan alat studio dan komunikasi	-	-	-
	4	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	1.997.938.942	1.955.186.300	97,9%
	5	Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	313.577.430	305.177.430	97,3%
<b>VI</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Masa</b>		<b>1.555.129.100</b>	<b>1.529.318.100</b>	<b>98,34</b>
	1	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	805.473.500	787.082.500	97,7%
	2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	702.444.220	697.604.220	99,3%
	3	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	47.211.380	44.631.380	94,5%
<b>TOTAL</b>			<b>5.357.522.848</b>	<b>5.218.923.419</b>	<b>97,41</b>



Berdasarkan Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Belanja Langsung Diskominfo tahun 2020 hampir semua realisasi keuangan khusus Belanja Langsung program dan kegiatan yang dilakukan Diskominfo pada tahun 2020 berada pada angka 90% ke atas. Serapan anggaran terkecil berada pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan angka 68,47%. Sedangkan penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan angka 100%.

Ada beberapa program dan kegiatan yang awalnya tercantum di dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang pada pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfo Kota Banda Aceh, dilakukannya prioritasasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo, serta dilakukannya *refocusing* plafon anggaran yang diberikan kepada Diskominfo akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini terdapat pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Pelayanan jasa pelelangan/pengadaan barang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Mebelur, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer, Program Peningkatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah pada kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa pada kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dan Pengadaan alat studio, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi pada kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi dan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi pada kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

Usaha-usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk menyesuaikan diri dengan hambatan-hambatan yang ditemui diantaranya :

1. Menyusun perencanaan kinerja Diskominfo yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi;

2. Menyusun, menata dan membakukan SOP, regulasi atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfo;
3. Mengalokasikan plafon anggaran dan dana kepada program dan kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat;
5. Meningkatkan profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dari seluruh SDM dimiliki oleh Diskominfo secara terus menerus dan berkesinambungan
6. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfo secara berkesinambungan.

Diharapkan dengan adanya usaha-usaha perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, kinerja dan performansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.



## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen strategis pembangunan berbasis kinerja pada Diskominfo terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam pemenuhan visi misi Diskominfo dan juga Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.

Secara keseluruhan pengukuran kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh pada Tahun 2020 sudah baik. Hal ini terlihat pada serapan anggaran perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Belanja Langsung Diskominfo Tahun 2020 yang mencapai angka 97,41% dimana Total Anggaran yang diberikan adalah 5.357.522.848,- dan total realisasi Belanja Langsung mencapai 5.218.923.419,-. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfo Kota Banda Aceh, dilakukannya prioritasasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo, serta dilakukannya *refocusing* plafon anggaran yang diberikan kepada Diskominfo akibat adanya pandemi COVID-19. Selain itu terdapat perubahan dan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo dimana yang semula memiliki 6 indikator kinerja menjadi 4 indikator kinerja.

Langkah yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Menyusun perencanaan kinerja Diskominfo yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, menyusun, menata dan membakukan SOP, regulasi atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfo, mengalokasikan plafon anggaran dan dana kepada program dan kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, meningkatkan profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dari seluruh SDM dimiliki oleh Diskominfo secara terus menerus dan berkesinambungan, meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfo secara berkesinambungan.

Demikian LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2020 ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja Organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

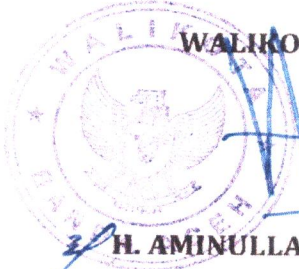
SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh  
 Tahun : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	15%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik	2	Persentase website OPD yang aktif	70%
		3	Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	93%
		4	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	45%

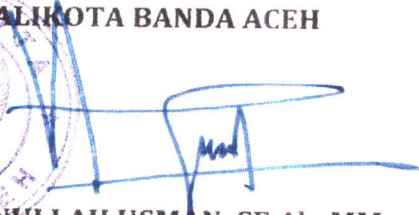
Program			Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	999.828.144
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	460.068.568
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	14.354.550
4	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp	496.330.917
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	1.199.029.058
6	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp	76.072.500
7	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp	105.687.467
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp	993.874.054
JUMLAH ANGGARAN		Rp	4.345.245.258

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Pihak Kedua



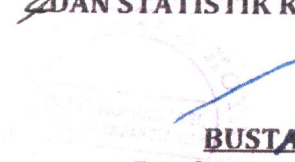
WALIKOTA BANDA ACEH

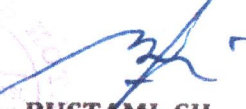


H. AMINULLAH USMAN, SE,Ak. MM

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH





BUSTAMI, SH.

Pembina Utama Muda /

NIP. 19630824 198703 1 004

No	Sasaran			Program	Kegiatan					Ket	
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja		Satuan	Target		
			100%	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	84.480.165	
						Keluaran	:	Jumlah waktu jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	Bln	12	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	10.071.338	
						Keluaran	:	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bln	12	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan alat tulis kantor	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	24.900.514	
						Keluaran	:	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	38	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	18.522.000	
						Keluaran	:	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	7	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.788.125	
						Keluaran	:	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	6	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan makanan dan minuman	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	80.121.542	
						Keluaran	:	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	Porsi	4840	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	40	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	92.610.000	
						Keluaran	:	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Laporan	20	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	6.401.600	
						Keluaran	:	Jumlah waktu jasa pelelangan/ pengadaan barang yang disediakan	Bulan	6	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	676.932.795	
						Keluaran	:	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	Bln	12	
						Hasil	:	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
999.828.144											
			100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	250.000.000	
						Keluaran	:	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	Unit	2	
						Hasil	:	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	100	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	21.000.000	
						Keluaran	:	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jenis	1	
						Hasil	:	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	100	
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	69.728.991	
						Keluaran	:	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Jenis	10	
						Hasil	:	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	100	
					Pengadaan Mebeleur	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
						Keluaran	:	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	Jenis	-	
						Hasil	:	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	-	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
						Keluaran	:	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	Kali	-	
						Hasil	:	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	-	
					Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	65.239.578	
						Keluaran	:	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional yang dilaksanakan	Kali	4	
						Hasil	:	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	100	







		Persentase website OPD yang aktif	70%	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	710.947.125						
						Keluaran	:	Jumlah kegiatan informasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	Keg	5						
						Hasil	:	Persentase terserapnya informasi pelaksanaan keperintahan kepada masyarakat	%	100						
					Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	37.889.066						
						Keluaran	:	Jumlah pembinaan terhadap kelompok informasi gampong yang dilaksanakan	Kali	6						
						Hasil	:	Persentase terserapnya informasi pelaksanaan keperintahan kepada masyarakat	%	100						
					Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	245.037.863						
						Keluaran	:	Jumlah penyuluhan KIG yang dilaksanakan	Kali	6						
						Hasil	:	Persentase terserapnya informasi pelaksanaan keperintahan kepada masyarakat	%	100						
					993.874.054											
JUMLAH																
4.345.245.258																

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

  
B. STAMIL, SH.  
Pembina Utama Muda / NIP. 19630824 198703 1 004



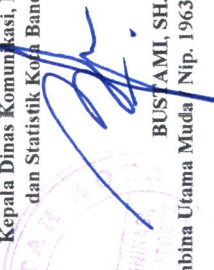


Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik Tahun 2017 - 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda Aceh	1 Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Jumlah data set yang tersedia Jumlah data set yang diharapkan x 100%	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2 Meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1 Persentase website OPD yang aktif	Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun Jumlah seluruh website SKPD x 100%	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			2 Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	Jumlah pengaduan masyarakat ditindak lanjuti Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk informasi x 100%	90%	92%	93%	94%	95%	BIDANG PIP / BIDANG SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
			3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi Jumlah seluruh SKPD x 100%	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

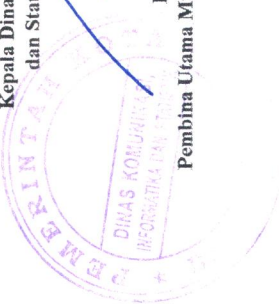
Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh



BUSTAMI, SH.

Pembina Utama Muda Nip. 19630824 198703 1 004



RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2017 S/D 2022

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah

Misi : 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

No	Tujuan	Sasaran		Kebijakan		Program
		Uraian Sasaran	Indikator Sasaran			
1	1.1 Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan berintegrasi dalam Kota Banda Aceh	1.1.1 Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	- Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	1.1.1.1 UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	1.1.1.1.1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
			- Persentase website OPD yang aktif	2.1.1.1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	2.1.1.1.1	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
				2.1.1.2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		
		2.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	- Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi	3.1.1.1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	4.1.1.1.1	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
				4.1.1.2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	4.1.1.1.2	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
			- Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	5.1.1.1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	5.1.1.1.1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

Banda Aceh, 31 Agustus 2020  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

  
BUSTAMI, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19630824 198703 1 004



